

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



KOTA PEKALONGAN  
2021



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PEKALONGAN

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



KOTA PEKALONGAN  
2021

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN 2021

ISBN	: -
Nomor Publikasi	: 33750.2217
Nomor Katalog	: 4102002.3375
Ukuran Buku	: A4 (21 x 29,7 cm)
Jumlah Halaman	: xiv + 57
Naskah	: BPS Kota Pekalongan
Gambar Kulit	: BPS Kota Pekalongan
Diterbitkan Oleh	: BPS Kota Pekalongan
Dicetak Oleh	: Vertikal Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



# TIM PENYUSUN

Pengarah : Drs. Rahyudin, M.Si

Penanggung Jawab : Misbah

Penyunting : Misbah

Penulis : Azka Muthia

<https://pekalongankota.bps.go.id>

<https://pekalongankota.bps.go.id>



# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan 2021 dapat terwujud.

Publikasi ini berisi gambaran tentang tingkat kemajuan pembangunan manusia yang telah dicapai oleh Kota Pekalongan selama periode 2017 s.d 2021 beserta komponen-komponen pendukungnya yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, serta hal lainnya yang terkait.

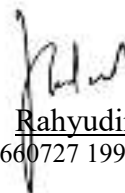
Dengan diterbitkannya IPM ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengambil kebijakan pembangunan khususnya pembangunan manusia pada masa yang akan datang.

Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan pada penyusunan mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pekalongan, Desember 2022

BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PEKALONGAN  
KEPALA,



Rahyudin  
NIP. 19660727 199212 1 001



# Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GRAFIK .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB 1 PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b> .....	<b>3</b>
1.1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan .....	3
1.2. Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia .....	4
1.3. Dimensi Pembangunan Manusia .....	6
1.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia .....	9
1.5. Sumber Data .....	9
1.6. Metode Penghitungan IPM.....	10
1.7. Perhitungan Kecepatan Perkembangan IPM.....	11
<b>BAB 2 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN</b> .....	<b>19</b>
2.1. Kota Pekalongan di Jaringan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan .....	 19
2.2. Status Pembangunan Manusia Kota Pekalongan .....	23
<b>BAB 3 CAPAIAN KAPABILITAS DASAR PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN</b> .....	<b>31</b>
3.1. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan.....	31
3.2. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan.....	34
3.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi.....	36
<b>BAB 4 PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH EKS KARESIDENAN PEKALONGAN</b> .....	<b>41</b>
4.1. Perkembangan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan .....	 42
.....	
<b>BAB 5 KESIMPULAN</b> .....	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>



# Daftar Table

---

	Halaman
Tabel 1.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM .....	10
Tabel 1.2 Nilai Konversi untuk Penghitungan RLS .....	12
Tabel 1.3 Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir .....	13
Tabel 4.1 Nilai IPM dan Status Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021 .....	41
Tabel 4.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)/ <i>Expected Years of Schooling</i> (EYS) di eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021.....	25

# Daftar Gambar

---

	Halaman
Gambar 1.1. Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP.....	5
Gambar 1.2. Perkembangan Implementasi Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP di Indonesia.....	7
Gambar 2.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Indonesia, 2017-2021.....	19
Gambar 2.2. Nilai IPM Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021.....	20
Gambar 2.3. Nilai UHH (Umur Harapan Hidup) Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021.....	21
Gambar 2.4. Nilai EYS (Harapan Lama Sekolah) Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021.....	21
Gambar 2.5. Nilai MYS (Rata-rata Lama Sekolah) Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021.....	22
Gambar 2.6. Nilai PPP (Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan) Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021 (Ribu Rupiah).....	23
Gambar 2.7. Tren dan Pertumbuhan IPM Kota Pekalongan, 2010-2021.....	24
Gambar 2.8. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan, 2011-2021.....	25
Gambar 2.9. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Harapan Lama Sekolah (EYS) Kota Pekalongan, 2010-2021.....	26

<b>Gambar 2.10.</b>	<b>Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan, 2010-2021.....</b>	<b>26</b>
<b>Gambar 3.1.</b>	<b>Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk di Kota Pekalongan, 2017-2021.....</b>	<b>32</b>
<b>Gambar 3.2.</b>	<b>Persentase Rumah Berdasarkan Ketidaklengkapan Fasilitas Perumahan yang Dimiliki di Kota Pekolangan, 2021 .....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 3.3.</b>	<b>Persentase Persalinan menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kota Pekalongan, 2017-2021 (Persen).....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar 3.4.</b>	<b>Persentase Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Pekalongan, 2021 (Persen).....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 3.5.</b>	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Pekalongan, 2017-2021 (Persen).....</b>	<b>36</b>
<b>Gambar 3.6.</b>	<b>Tingkat Pengangguran, Persentase Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan, 2017-2021 (Persen).....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 4.1.</b>	<b>Tiga Wilayah dengan UHH Tertinggi dan Terendah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021.....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 4.2.</b>	<b>Tiga Wilayah dengan RLS Tertinggi dan Terendah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021.....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4.3.</b>	<b>Tiga Wilayah dengan HLS Tertinggi dan Terendah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021.....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 4.4.</b>	<b>Tiga Wilayah dengan Pengeluaran Per Kapita Tertinggi dan Terendah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021.....</b>	<b>45</b>

# Daftar Lampiran

---

## Halaman

Lampiran 1.	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021.....	51
Lampiran 2	Tren Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021.....	52
Lampiran 3	Tren Komponen Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021.....	53
Lampiran 4	Tren Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021.....	54
Lampiran 5	Tren Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021.....	55
Lampiran 6	Tren Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP) menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021 (Ribu Rupiah).....	56





# PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

## PERKEMBANGAN METODOLOGI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) UNDP DI INDONESIA



# BAB I

# PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

## 1.1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan

Pada awalnya tepatnya sebelum tahun 1970, pembangunan hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi (Todaro dan Simth, 2003). Dunia hanya berfokus pada pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Namun, sejalan dengan berjalannya waktu muncul kesadaran bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tidak menjadi jaminan jika sejalan dengan yang tinggi tidak menjamin adanya perbaikan taraf hidup sebagian besar penduduknya. Data empiris memperlihatkan bahwa beberapa wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi masih harus memiliki permasalahan terkait pengangguran, kemiskinan, dan permasalahan sosial lain yang berhubungan dengan masyarakat.

Pendapatan regional dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang penting dalam pembangunan. Namun, kedua indikator tersebut belum dapat menjelaskan tentang manfaat pembangunan bagi masyarakat, seperti: akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemudian secara perlahan muncul konsep pembangunan manusia untuk mengimbangi konsep pembangunan yang hanya berorientasi pada sisi ekonomi.

Selain memperhitungkan aspek pendapatan, konsep pembangunan manusia juga mengukur tentang aspek kesehatan dan pendidikan. Pertama kali konsep pembangunan manusia diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan dengan judul *Human Development Report* (HDR). Dalam laporan tersebut UNDP menjelaskan bahwa manusia merupakan kekayaan suatu wilayah yang sesungguhnya. Manusia ditempatkan dalam konsep pembangunan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekedar bagian input dari suatu pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan manusia adalah menciptakan suatu lingkungan yang dapat memberikan kesempatan



kepada masyarakat untuk bisa berumur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

Lahirnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP pada tahun 1990, memunculkan warna baru dalam memahami pembangunan. Sudut pandang pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional. Perbedaan tersebut mencakup:

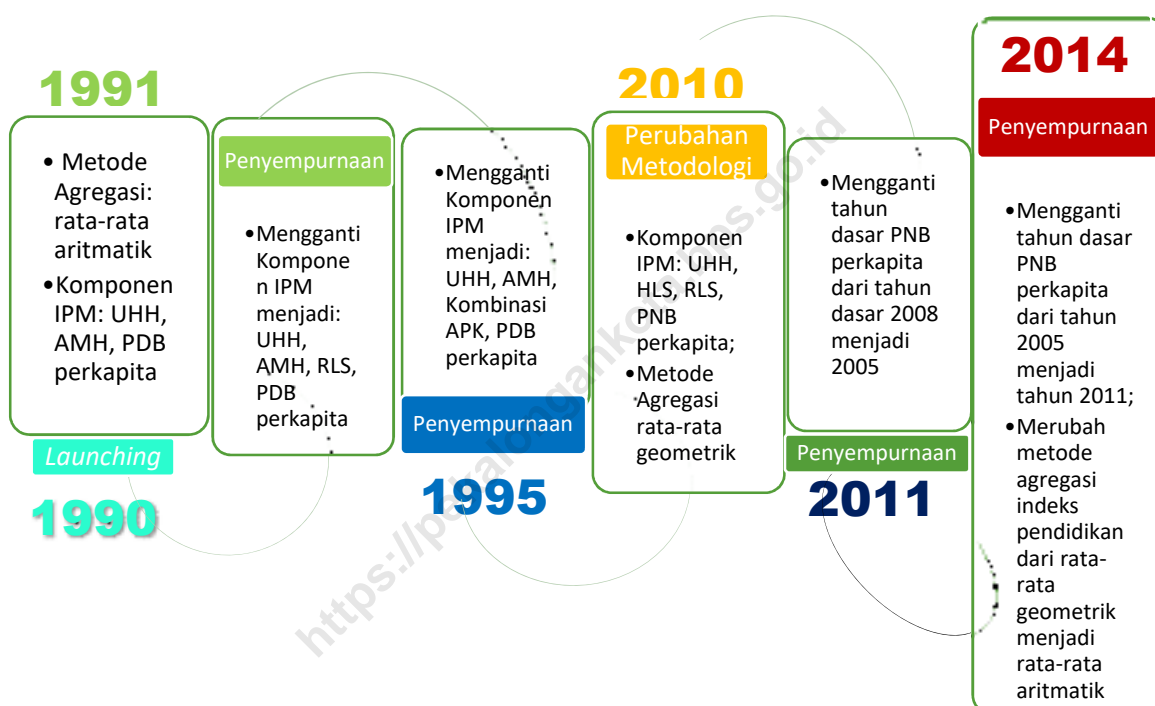
- Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan dalam pembangunan manusia. Meskipun tidak cukup dilihat dari aspek ini saja. Hal ini dikarenakan sering dijumpai daerah yang memiliki angka pendapatan regional atau pendapatan per kapita tinggi. Namun kemajuan manusia dalam masyarakat masih rendah. Demikian pula sebaliknya.
- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia hanya sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Keduanya hanya berfokus pada sisi penawaran yang memandang manusia sebagai sumber daya untuk menghasilkan produksi. Padahal manusia memiliki nilai yang lebih dari sekedar barang modal untuk kegiatan produksi. Hal ini dikarenakan manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses pembangunan.
- Pendekatan kesejahteraan masyarakat memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai peserta di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan pada kebijakan distribusi daripada struktur produksi.
- Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia.

## 1.2. Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia

Selain memuat konsep dan definisi dari pembangunan manusia, laporan *Human Development Report* juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur pembangunan manusia. Konsep pengukuran pembangunan manusia yang dibuat oleh UNDP dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak tahun 1990, IPM dipublikasikan secara berkala oleh UNDP dalam laporan tahunan HDR. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, lapangan usaha dan aspek lain dalam kehidupan yang merupakan bentuk capaian dari pembangunan suatu wilayah.

Pada HDR 1990 diperkenalkan tiga dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut diukur dengan menggunakan empat indikator dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan metode rata-rata aritmatik.

**Gambar 1.1. Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP**



UNDP secara berkala melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam penghitungan IPM. Meskipun menggunakan tiga dimensi yang sama, tetapi indikator yang digunakan dirubah, yaitu:

1. Agregasi Angka Melek Huruf (AMH) dan kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi agregasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS);
2. PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Selain perubahan pada indikator, UNDP juga merubah penghitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Hanya saja metode agregasi untuk indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Perubahan penghitungan IPM didasarkan suatu indeks komposit harus mampu

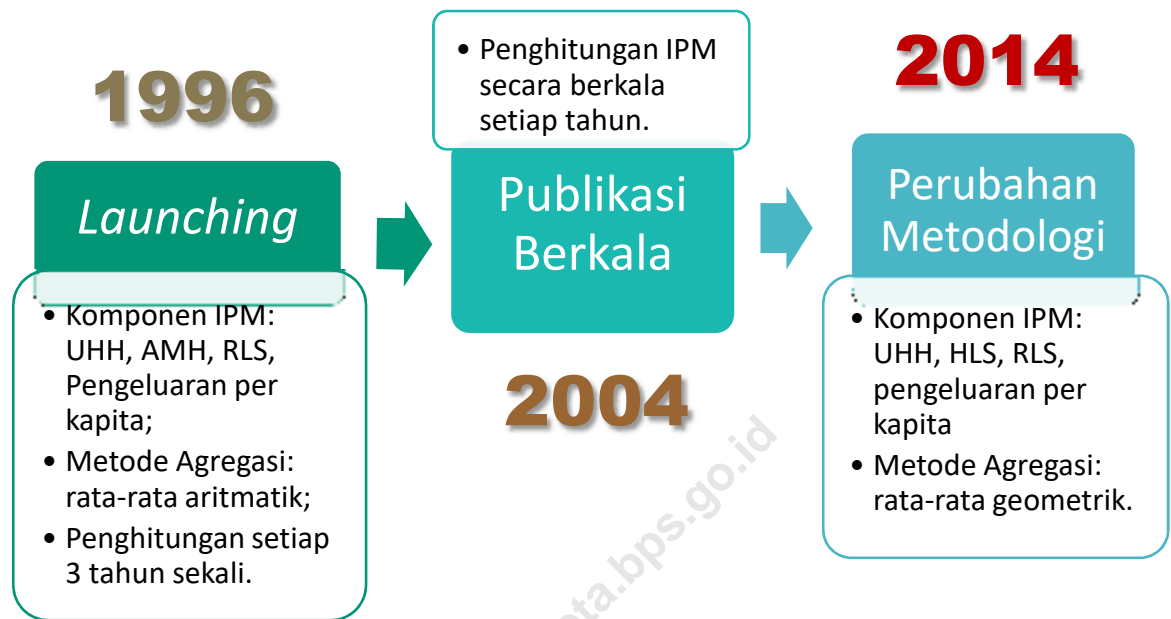
mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan relevan. Selain itu, alasan utama dilakukan perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada hal sebagai berikut:

1. Beberapa indikator sudah tidak relevan untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Misalnya Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi dijadikan indikator perkembangan pendidikan dikarenakan tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan suatu wilayah. Sebelum digunakannya penghitungan metode baru, nilai AMH di beberapa wilayah sudah tinggi sehingga indikator tersebut tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, indikator yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indeks komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH perlu diganti dengan indikator lain yang lebih representatif. Selain AMH, indikator yang diganti adalah PDRB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDRB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang turut menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar wilayah dalam penghitungan. Dengan demikian, PDRB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat bahkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.
2. Penggunaan rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi tertutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Sementara itu, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan dimensi dan menghindari ketimpangan. Penggunaan rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah (BPS, 2015) sehingga perlu diganti dengan rata-rata geometrik.

IPM metode baru yang disempurnakan pada tahun 2014 memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Indikator yang digunakan lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik;
  - Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah lebih relevan dalam menggambarkan dimensi pendidikan dan perubahannya;
  - Penggunaan PNB yang menggantikan PDRB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Penggunaan rata-rata geometrik dapat menutupi kekurangan pada suatu dimensi dengan dimensi lain yang unggul. Pembangunan manusia dapat terwujud jika terdapat keseimbangan antar dimensi yang sama penting.

**Gambar 1.2. Perkembangan Implementasi Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP di Indonesia**



Penghitungan IPM di Indonesia dimulai sejak tahun 1996. Pada saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun sekali. Namun sejak tahun 2004, IPM dihitung secara berkala setiap tahun sekali untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan, terutama dalam penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Metode baru penghitungan IPM diaplikasikan di Indonesia sejak tahun data 2014. Untuk memenuhi ketersediaan data pada tahun sebelumnya dilakukan *backasting* untuk periode data 2010-2013.

### 1.3. Dimensi Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 UNDP menetapkan tiga dimensi pembentuk IPM dalam penggambaran kualitas hidup manusia yang tidak mengalami perubahan sampai sekarang. Dimensi tersebut antara lain:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan menggunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Pentingnya umur harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan

kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penghitungan umur harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation). Data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang bersumber dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Metode estimasi yang digunakan adalah metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan sejarah kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum umur harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merefleksikan dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan dalam kehidupan produktif masyarakat modern. Harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan indeks pendidikan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama. Adapun dalam penghitungan indeks HLS dan RLS digunakan batasan nilai maksimum dan minimum yang sama dengan standar UNDP yaitu nilai maksimum dan minimum untuk HLS masing-masing 18 dan 0 tahun, sedangkan untuk RLS masing-masing 15 dan 0 tahun. Sumber data yang digunakan untuk indikator HLS dan RLS adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret, data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama dan hasil inventarisasi data sektoral di daerah.

Dimensi ketiga dari pembangunan manusia adalah pemenuhan standar hidup yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator dimensi ini. Akan tetapi, mengingat data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah, maka dipilih alternatif lain berupa indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini dapat dihitung sampai level kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan

masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari semakin membaiknya perekonomian. Data rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan hasil Susenas modul konsumsi, indeks harga konsumen, dan data harga komoditas non makanan hasil survei harga konsumen.

#### 1.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) di suatu daerah.

Sejak tahun 2014 angka IPM di Indonesia disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPM yang dilakukan secara periodik menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota dapat mengetahui peta pembangunan manusia di daerahnya yang mencakup: capaian, kecepatan, posisi, maupun disparitas antar daerah. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok menurut status capaiannya. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sangat tinggi :  $IPM \geq 80$
2. Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
3. Sedang :  $60 \leq IPM < 70$
4. Rendah :  $IPM < 60$

Selain itu untuk melihat capaian pembangunan, IPM dapat juga dimanfaatkan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga sebagai indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai salah satu indikator dalam pengalokasian DID.

#### 1.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan IPM ini adalah data olahan yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021.

## 1.6. Metode Penghitungan IPM

Indeks komponen IPM merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimumnya dan nilai minimum indikator tersebut. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i) \text{ min}}] / [X_{(i) \text{ maks}} - X_{(i) \text{ min}}]$$

### Keterangan :

$X_{(i)}$  : indikator ke-i (i=1,2,3,..)

$X_{(i) \text{ min}}$  : Nilai Maksimum  $X_{(i)}$

$X_{(i) \text{ min}}$  : Nilai Minimum  $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indikator ( $X_{(i)}$ ) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

### Keterangan:

- \* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.
- \*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan pada tahun 2025.

Perhitungan IPM secara rumus dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

### Keterangan :

$X_{(1)}$  : Indeks Kesehatan

$X_{(2)}$  : Indeks Pengetahuan/Pendidikan

$X_{(3)}$  : Indeks Standar Hidup Layak

Hasil perhitungan IPM memberikan gambaran seberapa jauh suatu wilayah telah mencapai sasaran pembangunan yang disentuh, yaitu angka harapan hidup 85 tahun. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tingkat pengeluaran konsumsi yang telah mencapai standart hidup layak. Semakin angka IPM suatu wilayah mendekati angka 100 maka semakin mendekati dengan sasaran yang dicapai.

### 1.7. Perhitungan Kecepatan Perkembangan IPM

Dalam menghitung kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu maka digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan angka IPM maka semakin cepat IPM suatu wilayah dalam mencapai nilai maksimalnya.

Pertumbuhan IPM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\Delta \text{IPM} = \frac{(\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1})}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100$$

dengan :

$\text{IPM}_t$  = IPM suatu wilayah pada tahun t

$\text{IPM}_{t-1}$  = IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Untuk penghitungan komponen penyusun IPM yang lain adalah sebagai berikut:

#### a) Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )

Menurut UNDP usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*Life Expectancy at Birth*) yang biasa dinotasikan dengan  $e_0$ . Karena di Indonesia tidak memiliki sistem registrasi langsung maka digunakan metode dengan memakai dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup/ALH (*live briths*) dan rata-rata anak yang masih hidup/AMH (*still living*) per wanita 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan perhitungan  $e_0$  dilakukan dengan menggunakan *software mortpack*.

#### b) Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)

Kedua indikator pendidikan ini dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan.

b.1) Penghitungan Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) adalah sebagai berikut :



$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

**Keterangan:**

$HLS_a^t$  : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$E_i^t$  : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_i^t$  : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

$i$  : Usia (a,a+1,...+n)

b.2) Penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)

- **Langkah Pertama**, menyeleksi penduduk pada usia 25<sup>th</sup> ke atas.
- **Langkah Kedua**, menghitung lamanya sekolah dengan cara:
  - Jika partisipasi sekolah yaitu **tidak/belum pernah bersekolah**, maka **lama sekolah = 0**.
  - Jika partisipasi sekolah yaitu **masih bersekolah** atau **tidak bersekolah lagi**, maka lama sekolah mengikuti Tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Nilai Konversi untuk Penghitungan RLS**

Keterangan	Lama Sekolah
<b>Masih bersekolah</b> di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
<b>Masih bersekolah</b> S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
<b>Tidak bersekolah lagi</b> tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
<b>Tidak bersekolah lagi</b> dan tamat pada jenjang pendidikan terakhir	Konversi ijazah terakhir

- **Langkah Ketiga**, menghitung rata-rata lama sekolah:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

**Keterangan:**

**RLS** : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

**Lama sekolah penduduk<sub>i</sub>** : lama sekolah penduduk ke-*i* di suatu wilayah

**N** : jumlah penduduk ( $i = 1, 2, 3, \dots, n$ )

Konversi lama sekolah menurut ijazah terakhir mengikuti ketentuan pada Tabel 2.3.

**Tabel : 1.3. Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir**

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)
(1)	(2)
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMALB/MA/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

### c) Kemampuan daya beli

Untuk mengukur kemampuan daya beli digunakan variabel *purchasing power parity* yakni konsumsi per kapital riil yang telah disesuaikan dengan sumber data yang digunakan adalah data Susenas 2020. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan secara konseptual sudah sangat jelas dan lengkap dalam penyeleksian taraf pembangunan manusia.

#### 1. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dalam Harga Konstan (riil)

Langkah-langkah penghitungan rata-rata pengeluaran per Kapita dari Susenas, antara lain:

- **Langkah Pertama**, hitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga.
- **Langkah Kedua**, hitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota.

- **Langkah Ketiga**, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan ( $Y'_t$ ) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan x 12/1000.

Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) menggunakan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK(t,2012)} \times 100$$

Keterangan:

$Y_t^*$  : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

$Y'_t$  : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK(t,2012)$  : IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

## 2. Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP)

Langkah-langkah penghitungan paritas daya beli, antara lain:

- **Langkah Pertama**, menghitung harga rata-rata komoditas terpilih.

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

**Keterangan:**

$P_i$  : Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah

$V_i$  : Total *value* (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah

$Q_i$  : Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK.

- **Langkah Kedua**, menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut:

$$\text{ParitasDayaBeli}_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

**Keterangan:**

$p_{ij}$  : harga komoditas i di Jakarta Selatan

$p_{ik}$  : harga komoditas i di kab/kota j

$m$  : jumlah komoditas

- **Langkah Ketiga**, menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{ParitasDayaBeli}}$$

**Keterangan:**

$Y_t^{**}$  : Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

$Y_t^*$  : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan

2012



<https://pekalongankota.bps.go.id>

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN



## Umur Harapan Hidup

UHH Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar

**74,44  
TAHUN**

## Rata-rata Lama Sekolah

RLS Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar

**9,18  
TAHUN**

## Harapan Lama Sekolah

HLS Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar

**12,85  
TAHUN**

## Pengeluaran per Kapita per Tahun yang disesuaikan

PPP Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar

**12,598  
JUTA**

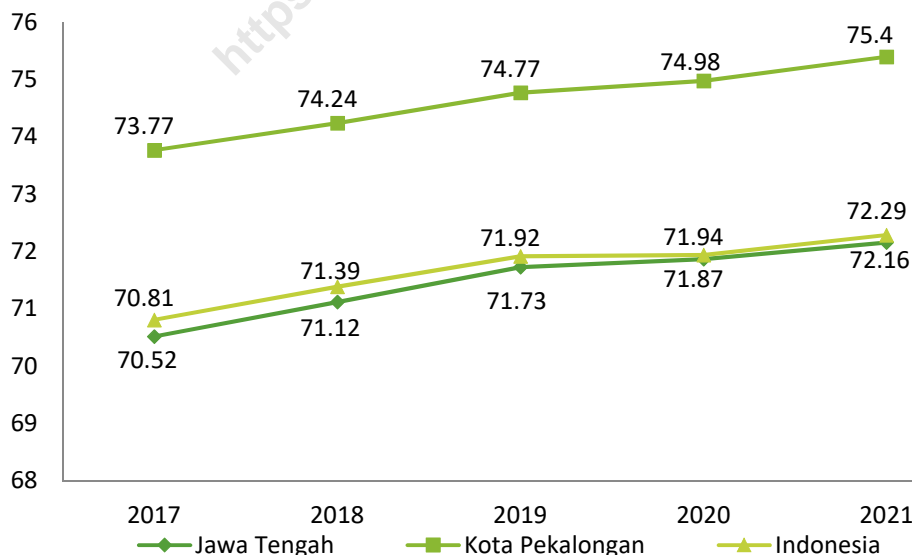
## BAB 2

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN

### 2.1. Kota Pekalongan di Jajaran Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan

Dengan adanya konsep pembangunan manusia semakin memperluas sudut pandang pembangunan. Selama periode tahun 2017 s.d 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada Gambar 3.1 terlihat bahwa capaian IPM Kota Pekalongan sudah berada di atas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia.

**Gambar 2.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Indonesia, 2017-2021**



Sumber: BPS

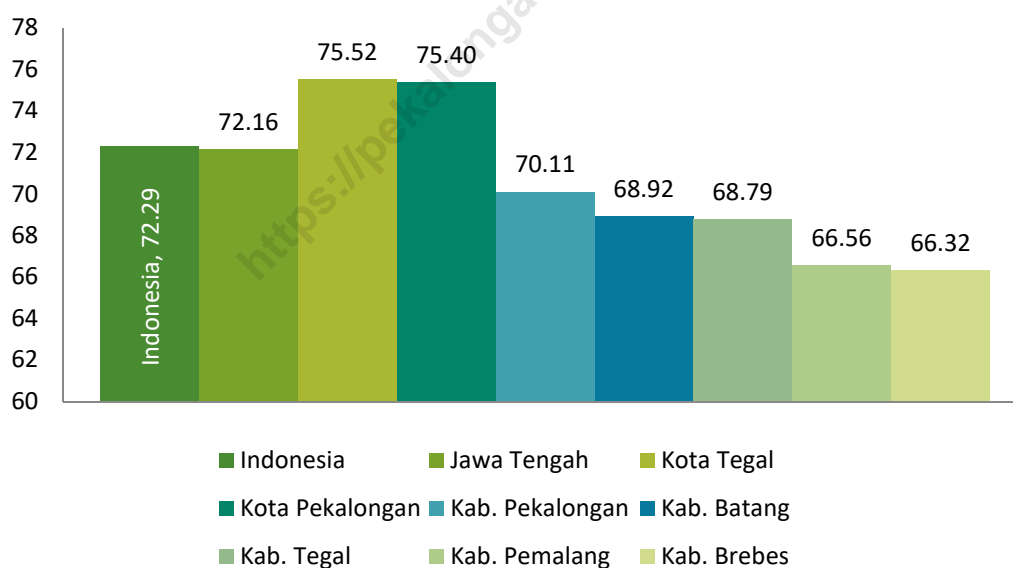
Pada tahun 2021, IPM Kota Pekalongan telah mencapai angka 75,40. Dengan angka capaian IPM tersebut, Kota Pekalongan dapat dikategorikan berada pada posisi status pembangunan manusia “tinggi”. Angka tersebut juga membawa Kota

Pekalongan menduduki peringkat ke 9 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian pembangunan manusia di Indonesia.

Dalam wilayah eks karesidenan Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah hanya Kota Tegal yang nilainya lebih unggul dibandingkan Kota Pekalongan, sedangkan kabupaten lainnya masih di bawah Kota Pekalongan. Hampir seluruh kabupaten dalam wilayah eks Karesidenan Pekalongan masih dikategorikan status pembangunan manusia “sedang” kecuali Kabupaten Pekalongan dan wilayah perkotaan yang sudah mencapai status pembangunan manusia berkategori “tinggi”.

Selain dilihat dari tingkat pembangunan manusia yang tinggi, pencapaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari perkembangan pembangunannya. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah eks karesidenan Pekalongan, pada tahun 2021 perkembangan IPM Kota Pekalongan berada di bawah Kabupaten Pekalongan, Kota Tegal dan di atas 4 kabupaten/kota se eks Karesidenan Pekalongan.

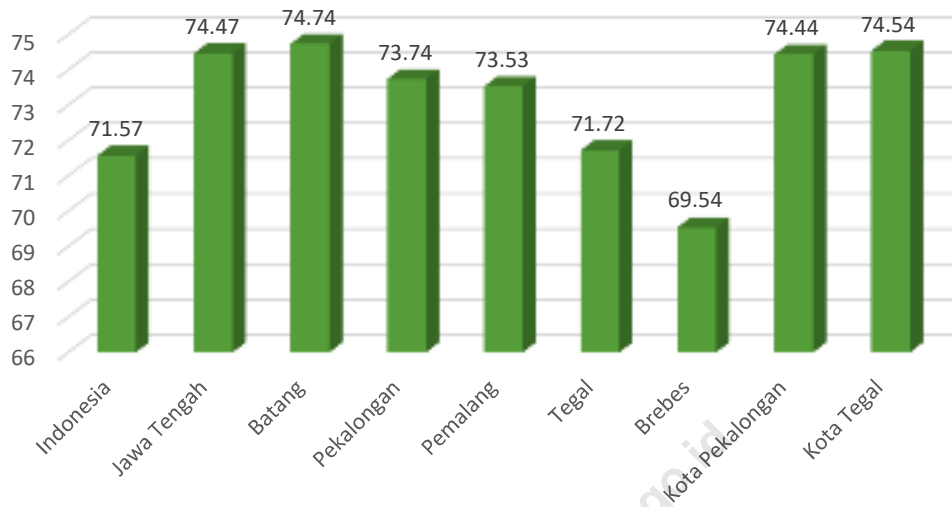
**Gambar 2.2. Nilai IPM Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**



**Sumber: BPS**

Selisih capaian IPM Kota Pekalongan dengan IPM Kota Tegal hanya sedikit, yaitu sekitar 0,12 poin pada tahun 2021. Perbedaan capaian tersebut disumbangkan oleh komponen IPM yang terkait yaitu Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita. Di wilayah Karesidenan Eks Pekalongan, Kota Tegal menduduki peringkat pertama dalam komponen tersebut.

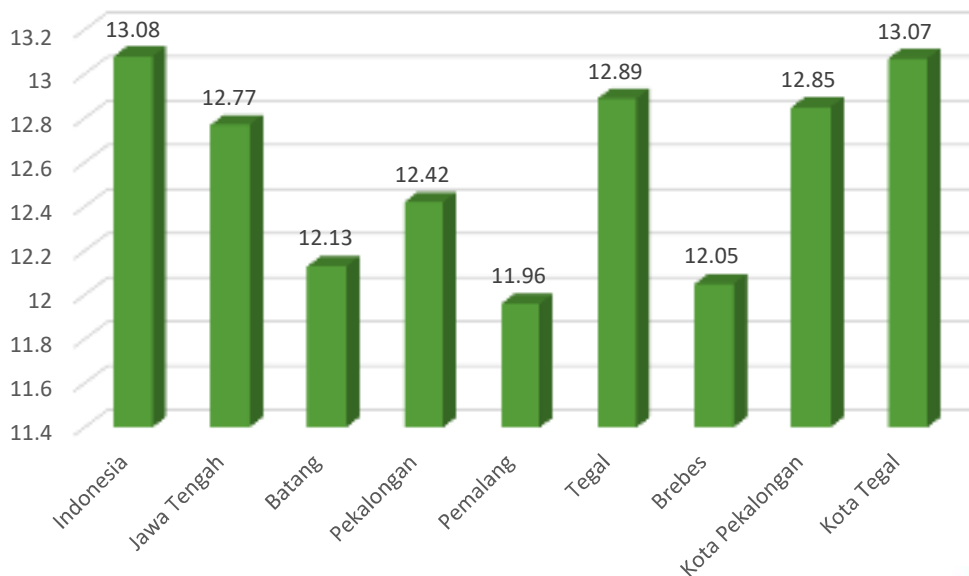
**Gambar 2.3. Nilai UHH (Umur Harapan Hidup) Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**



Sumber: BPS

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kota Pekalongan menempati posisi tertinggi ketiga di wilayah Karesidenan Eks Pekalongan setelah Kota Tegal dan Kabupaten Batang. Selain itu, UHH Kota Pekalongan masih di atas kabupaten lain di wilayah Karesidenan Eks Pekalongan maupun angka Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Umur harapan hidup di Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebesar 74,44 yang artinya bayi baru lahir di Kota Pekalongan memiliki harapan hidup sampai usia 74,44 atau sekitar umur 74 sampai 75 tahun.

**Gambar 2.4. Nilai EYS (Harapan Lama Sekolah) Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**

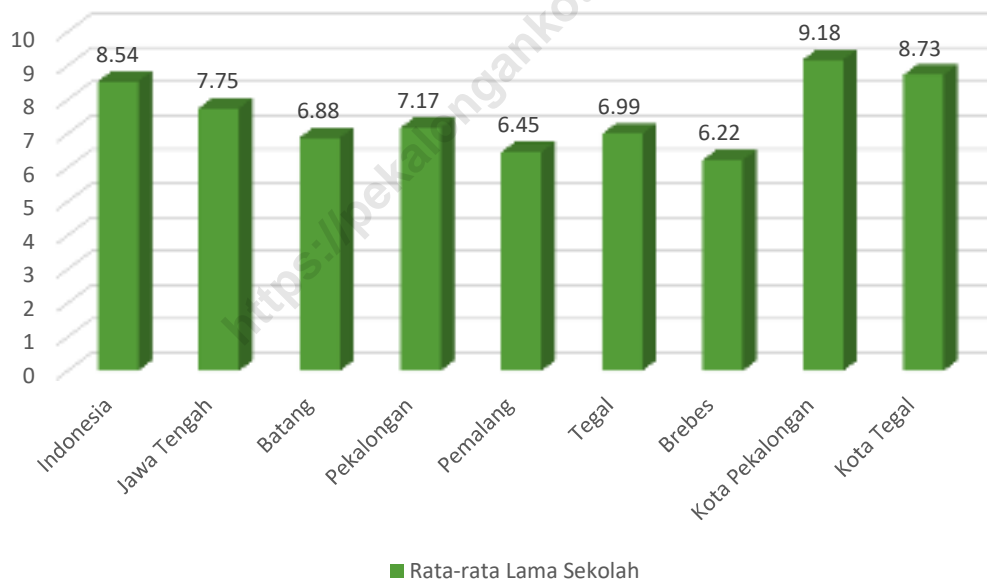


Sumber: BPS



Dalam bidang pendidikan terkait capaian komponen harapan lama sekolah yang tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan masih dipegang oleh Kota Tegal, sedangkan harapan lama sekolah yang terendah ditempati Kabupaten Pemalang. Di Kota Pekalongan angka harapan lama sekolah atau Expected Years of Schooling sebesar 12,85 pada tahun 2021. Angka ini jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan menempati urutan ke-3. Angka Harapan sekolah ini menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kota Pekalongan yang memiliki angka harapan sekolah sebesar 12,85 berarti bahwa rata-rata penduduk usia 7 tahun yang bertempat tinggal di Kota Pekalongan berpeluang menyelesaikan sekolahnya sampai jenjang D1.

**Gambar 2.5. Nilai MYS (Rata-rata Lama Sekolah) Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**



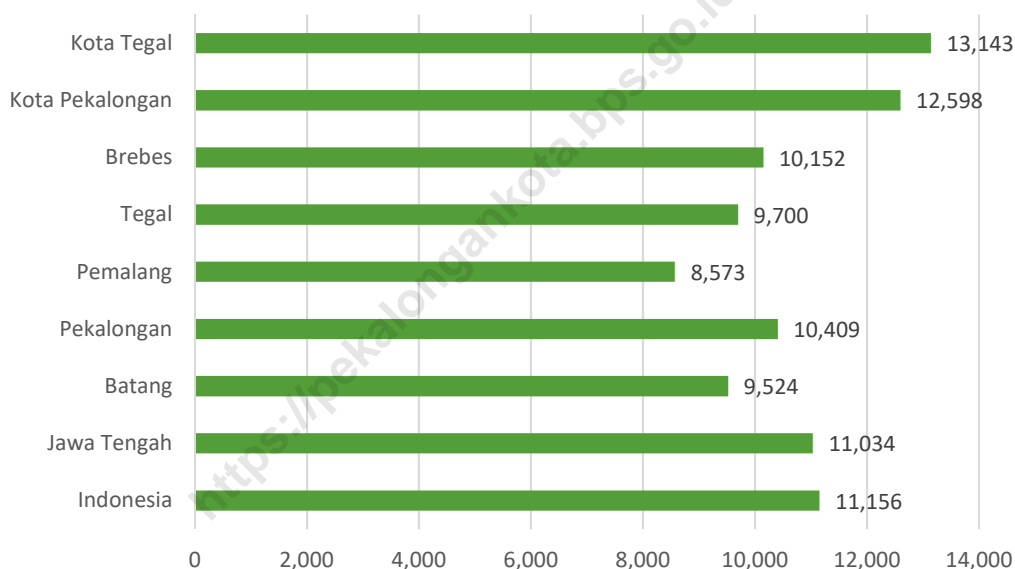
Sumber: BPS

Kota Pekalongan pada tahun 2021 memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi di wilayah eks Karesidenan Pekalongan yakni 9,18 tahun kemudian disusul Kota Tegal yang hanya berselisih sebesar 0,45 tahun. Capaian Kota Pekalongan pada komponen IPM terkait rata-rata lama sekolah juga masih di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yang nilainya sebesar 7,75 tahun maupun capaian Indonesia yang hanya tercatat sebesar 8,54 tahun.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) di Kota Pekalongan menduduki peringkat kedua tertinggi di wilayah Karesidenan Eks Pekalongan setelah Kota Tegal.

Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita di Kota Pekalongan sebesar Rp. 12,598 juta. Selisih capaian PPP Kota Pekalongan dengan Kota Tegal tercatat hanya terputus tipis yakni sebesar Rp. 545.000,-. Di lain pihak, capaian Kota Pekalongan tersebut cukup jauh terputusnya di atas capaian pengeluaran per kapita dengan kabupaten yang ada di wilayah Karesidenan Eks Pekalongan bahkan masih di atas capaian Provinsi Jawa Tengah maupun capaian Indonesia. Kabupaten Pemalang menempati peringkat terbawah pada komponen IPM mengenai PPP di wilayah Karesidenan Eks Pekalongan yang tercatat hanya sebesar Rp. 8,57 juta.

**Gambar 2.6. Nilai PPP (Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan) Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2021 (Ribu Rupiah)**



Sumber: BPS

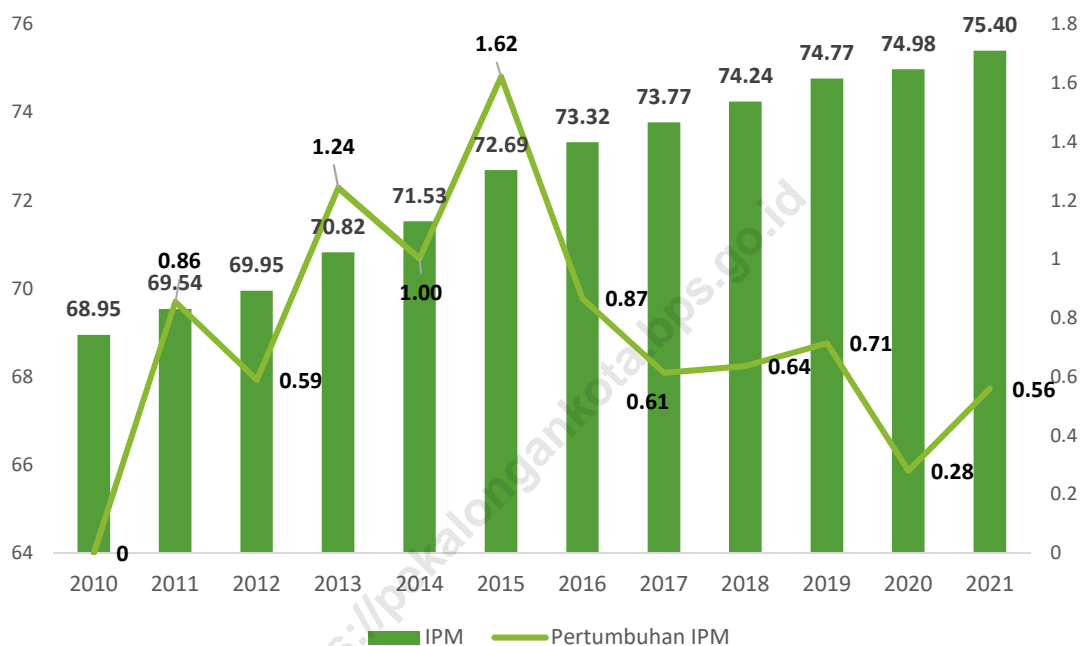
## 2.2. Status Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Secara keseluruhan pembangunan manusia Kota Pekalongan terus mengalami kemajuan selama periode 2011 s.d 2021. IPM Kota Pekalongan meningkat dari 69,54 pada tahun 2011 menjadi 75,40 pada tahun 2021. Selama kurun waktu satu dekade terjadi peningkatan dalam pembangunan sebesar 5,86 poin. Selama periode tersebut, rata-rata kecepatan berkembang IPM Kota Pekalongan adalah sebesar 0,90 persen per tahun.

Selain kecepatan tumbuh IPM, status pembangunan manusia juga bisa digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia dapat menjadi pedoman dalam melihat perkembangan hasil pembangunan manusia. Pembangunan manusia Kota Pekalongan telah berstatus “tinggi”

dari periode 2013 s.d 2021, sebelumnya yaitu dari tahun 2011 s.d 2012 pembangunan manusia Kota Pekalongan masih berstatus “sedang”. Keberhasilan Kota Pekalongan dalam meraih peningkatan status pembangunan tersebut merupakan dampak dari semakin meningkatnya IPM Kota Pekalongan. Meningkatnya angka IPM tersebut juga dapat mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan, pendidikan dan perekonomian Kota Pekalongan juga telah mengalami kemajuan.

**Gambar 2.7. Tren dan Pertumbuhan IPM Kota Pekalongan, 2010-2021**



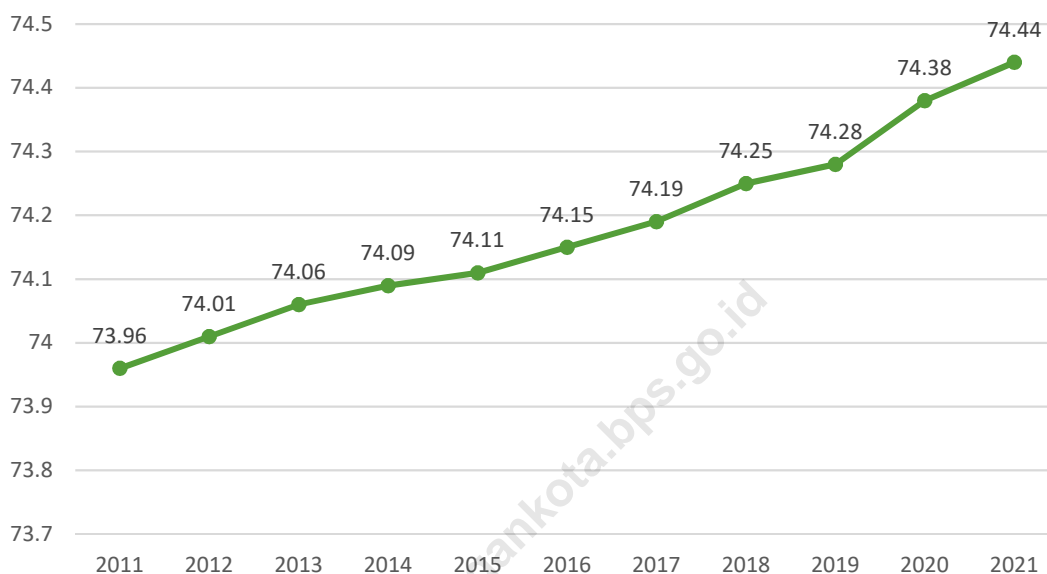
Sumber: BPS

Peningkatan IPM Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebesar 0,56 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Jika dilihat selama satu dekade peningkatan IPM yang paling rendah terjadi pada tahun 2020. Hal ini karena imbas dari melandanya pandemi Covid-19 di hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota Pekalongan pada tahun 2020. Hal tersebut terlihat dari peningkatannya yang tidak signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 juga memberi pengaruh negatif pada beberapa aspek kehidupan tidak hanya dunia kesehatan, namun juga perekonomian, pendidikan dan sosial.

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Dari indikator UHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses sampai kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir di Kota Pekalongan dari tahun 2011 s.d 2021 menunjukkan adanya peningkatan capaian setiap tahunnya. Bayi

yang lahir pada tahun 2011 memiliki peluang dapat bertahan hidup sampai berumur 73,96 tahun, sedangkan bayi yang lahir pada tahun 2021 berpeluang bisa bertahan hidup sampai berumur 74,44 tahun. Semakin membaiknya nilai UHH Kota Pekalongan sampai tahun 2021 menunjukkan semakin membaiknya pembangunan di bidang kesehatan.

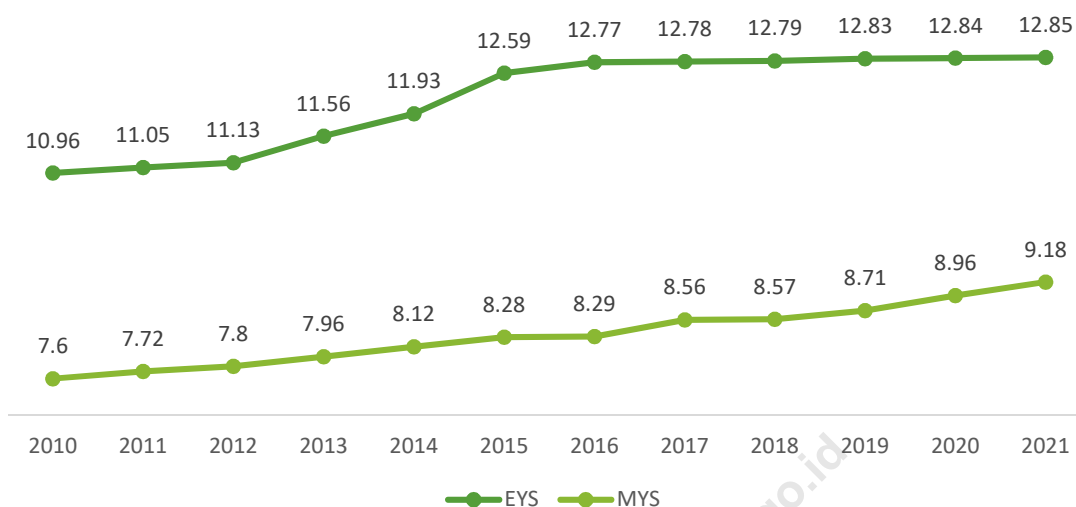
**Gambar 2.8. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan, 2010-2021**



Sumber: BPS

Dimensi Pengetahuan diukur dengan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebesar 9,18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Kota Pekalongan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,18 tahun atau dengan kata lain sudah lulus SMP atau kelas X. Pencapaian ini sudah sesuai harapan pemerintah yang mewajibkan penduduk untuk mengenyam pendidikan dasar selama 9 tahun sesuai dengan amanah Undang-undang Republik Indonesia Dasar 1945 Pasal 31 yang diperkuat dengan dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Disisi lain, jika dilihat dari angka HLS Kota Pekalongan pada tahun 2021 telah mencapai 12,85 tahun. Angka ini menjelaskan bahwa secara rata-rata anak yang berusia 7 tahun di Kota Pekalongan yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2021 memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formalnya selama 12,85 tahun atau setara Diploma I. Kondisi ini tentu menambah rasa optimis Pemerintah Kota Pekalongan dapat mencapai target program wajib belajar 9 tahun.

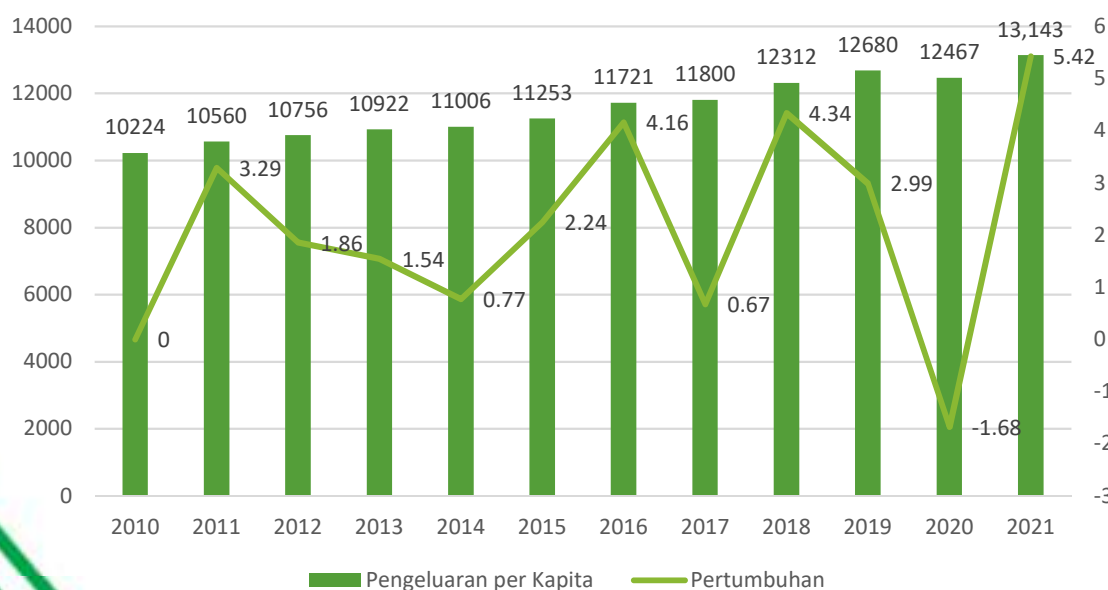
**Gambar 2.9. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Harapan Lama Sekolah (EYS) Kota Pekalongan, 2010-2021**




Sumber: BPS

Dimensi standar hidup layak diukur dengan menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator tersebut dapat menggambarkan kemampuan daya beli penduduk selama periode waktu tertentu. Pengeluaran per kapita Kota Pekalongan terus meningkat selama satu dekade dari tahun 2011 s.d 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,13 persen per tahun. Terlihat pada tahun 2021 pengeluaran riil per kapita per tahun Kota Pekalongan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah dunia termasuk Kota Pekalongan.

**Gambar 2.10. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan, 2010-2021**



Sumber: BPS



IPM merupakan indikator yang pengukurannya memerlukan waktu lama sehingga perkembangannya tidak bisa dilihat secara instan dan menganalisisnya juga harus dilihat secara menyeluruh antara komponennya. Komponen IPM dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja pemerintah terhadap capaian dari sasaran pembangunan daerah yang telah dicanangkan.



<https://pekalongankota.bps.go.id>

# CAPAIAN KAPABILITAS DASAR PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021



## APS Tahun 2021

7-12 Tahun **99,57 Persen**  
13-15 Tahun **96,89 Persen**  
16-18 Tahun **64,50 Persen**  
19-24 Tahun **19,54 Persen**

sebanyak **31,68 Persen** penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki ijazah SMA Sederajat



TPT **6,89 Persen**

Persentase Miskin **7,59 Persen**

## **BAB 3**

# **CAPAIAN KAPABILITAS DASAR PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN**

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset bangsa yang juga menjadi modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat sehingga potensi dan kontribusinya dalam pembangunan juga dapat meningkat. Pembangunan manusia yang sudah dilakukan selama ini sudah sangat menggembirakan. Namun, pemerintah tidak boleh berpuas dulu karena masih banyak tantangan di depan mata yang menunggu untuk diselesaikan.

### **3.1. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan**

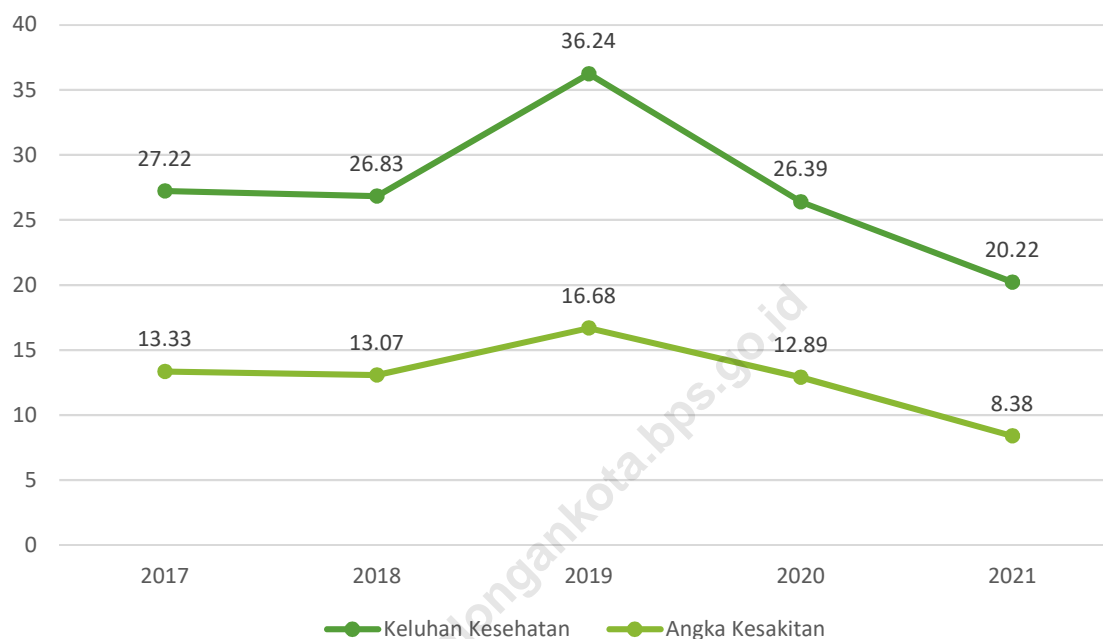
Kesehatan merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Tujuan dilakukannya pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang. Dengan demikian indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan adalah penduduk dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan juga bisa berperilaku yang sehat pula. Selain itu, penduduk dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkanya baik dari segi akses maupun biaya serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

Seseorang yang berumur panjang dapat memberikan kontribusi yang lebih lama dalam pembangunan. Untuk bisa memiliki umur panjang perlu ditunjang dengan tingkat kesehatannya yang baik juga. Pendekatan umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator umur harapan hidup saat lahir ( $e_0$ ). Indikator tersebut dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dari mulai sarana prasarana, akses sampai kualitasnya. Pada Bab 2 sudah dijelaskan bahwa nilai UHH Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 s.d



2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kota Pekalongan juga terus mengalami perbaikan.

**Gambar 3.1. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk di Kota Pekalongan, 2017-2021**



**Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS**

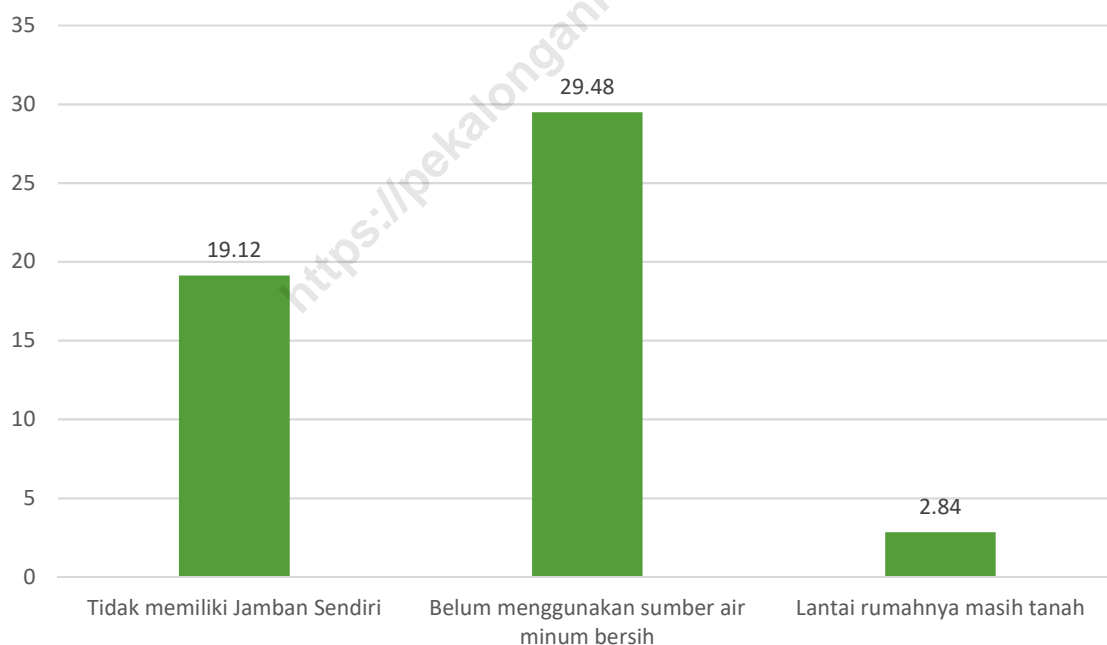
Selain UHH, indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah adalah keluhan kesehatan penduduk. Adanya keluhan terhadap kesehatan mengindikasikan adanya gejala penyakit atau kondisi tubuh yang tidak sehat. Hasil Susenas 2021 mencatat bahwa persentase penduduk Kota Pekalongan yang mengalami keluhan kesehatan adalah sebanyak 20,22 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 2 dari 10 orang di Kota Pekalongan yang mempunyai keluhan kesehatan. Jika dilihat dari tren nya terlihat selama 5 tahun terakhir angka keluhan kesehatan semakin membaik, hal ini semakin memperkuat bahwa pembangunan di dunia kesehatan telah mengalami perbaikan.

Terkait keluhan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat juga perlu dilakukan pemilahan apakah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari atau tidak. Jika keluhan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat juga mengganggu aktivitasnya sehari-hari maka hal tersebut dihitung sebagai morbiditas/angka kesakitan. Semakin tinggi angka kesakitan menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang muncul sebagai akibat lemahnya daya resistensi. Buruknya kondisi kesehatan seseorang akan

mempengaruhi juga usia harapan hidup dan tingkat mortalitasnya. Dari data Susenas tahun 2021 terlihat bahwa angka kesakitan Kota Pekalongan adalah 8,38 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai angka 12,89 persen. Selain itu jika dilihat secara tren menunjukkan selama lima tahun terakhir angka kesakitan trennya menurun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan semakin membaik.

Fasilitas perumahan juga digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dari sebuah rumah untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut, adalah: kualitas material, luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas material yang dimaksud mencakup jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Penghuni rumah akan semakin nyaman jika kualitas perumahannya semakin baik dan fasilitas perumahan yang ada dapat digunakan secara optimal.

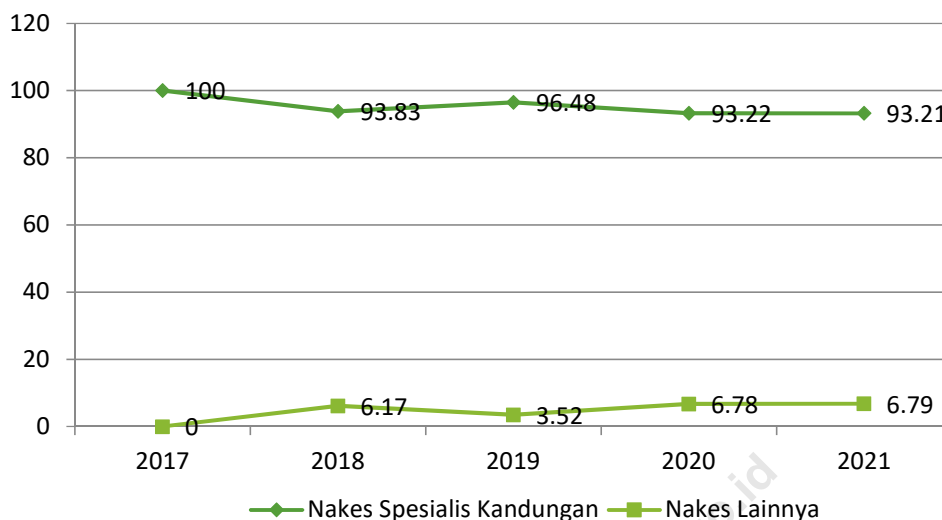
**Gambar 3.2. Persentase Rumah Berdasarkan Ketidakiengkapan Fasilitas Perumahan yang Dimiliki di Kota Pekalongan, 2021**



**Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS**

Dari data Susenas Tahun 2021 diketahui jika terdapat 19,12 persen rumah tangga di Kota Pekalongan yang tidak memiliki jamban sendiri. Kemudian masih ada sebanyak 29,48 persen rumah tangga yang belum menggunakan sumber air minum bersih, dan hanya sekitar 2,84 persen rumah tangga yang jenis lantainya masih tanah. Pada Tabel 3.1 terlihat persentase kondisi rumah tangga Kota Pekalongan yang tinggal di lingkungan yang kurang sehat.

**Gambar 3.3. Persentase Persalinan menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kota Pekalongan, 2017-2021 (Persen)**



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Dalam lima tahun terakhir terdapat semua kelahiran balita di Kota Pekalongan telah ditangani oleh tenaga medis dimana kecenderungannya ditangani oleh tenaga medis spesialis kandungan (dokter kandungan dan bidan). Hal ini menunjukkan sudah adanya kesadaran dari masyarakat di Kota Pekalongan terutama para ibu untuk melakukan persalinan dengan ibu dibantu tenaga medis. Dengan demikian ratio kematian balita dan ibu melahirkan di Kota Pekalongan semakin dapat ditekan.

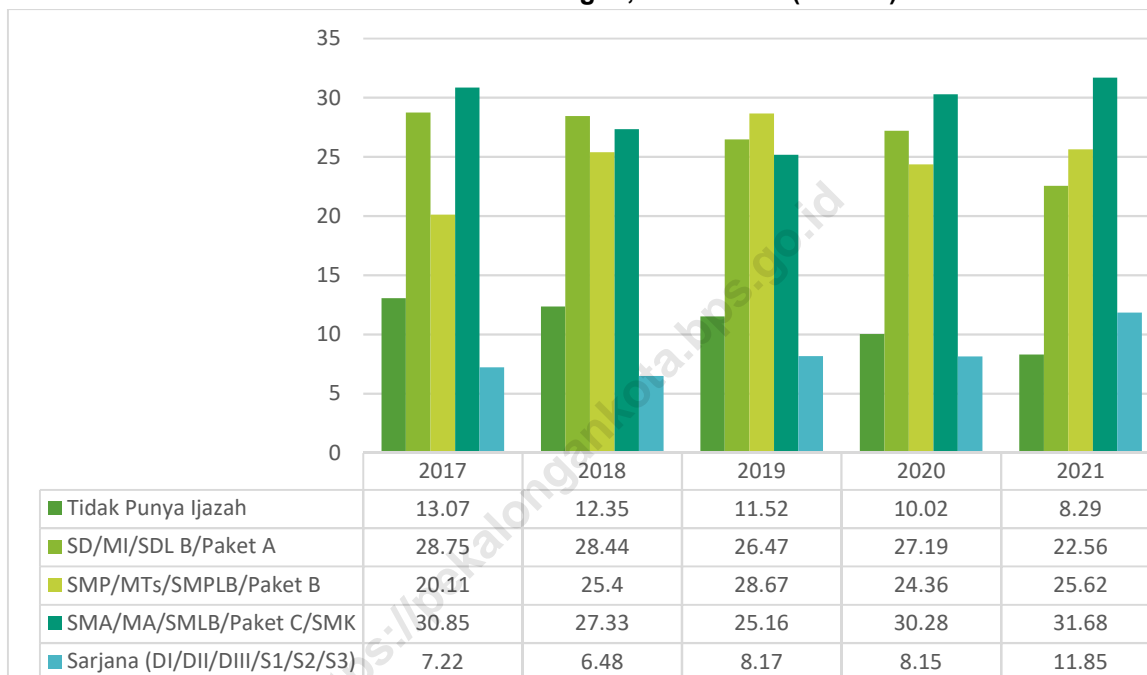
### 3.2. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, misalnya dengan memperluas cakupan pendidikan formal sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses fasilitas pendidikan. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Diantaranya dengan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar atau disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah

Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian manusia serta dapat menambah wawasan baik dalam pengetahuan maupun relasi sehingga dapat menambah peluang dalam mendapatkan penghidupan yang layak dengan luasnya kesempatan untuk bekerja. Dengan pendapatan yang mencukupi minimal kebutuhan dasarnya maka tingkat kesehatannyapun akan terjamin sehingga akan memperpanjang masa hidupnya.

Secara umum latar belakang pendidikan formal yang ditamatkan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan maka semakin luas wawasan dan relasinya serta semakin tinggi keterampilan dan keahliannya. Hal tersebut merupakan modal yang cukup untuk mendapatkan kesempatan bekerja.

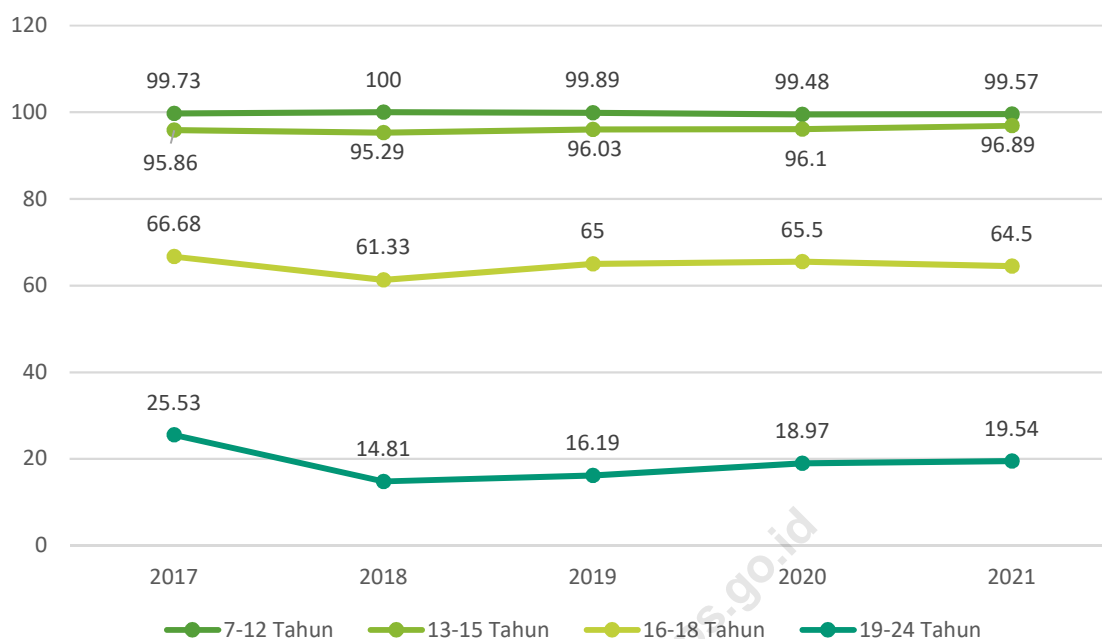
**Gambar 3.4. Persentase Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Pekalongan, 2017 - 2021 (Persen)**



**Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS**

Usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam melakukan pembangunan di dunia pendidikan perlu diberikan apresiasi. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa semakin menurun jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah. Hal ini menunjukkan sudah adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dari penduduk Kota Pekalongan. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk terus melakukan peningkatan dalam pembangunan manusia di bidang pendidikan baik dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pengajar. Harapannya angka RLS dan HLS dapat terus meningkat sehingga angka IPM juga meningkat.

**Gambar 3.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Pekalongan, 2017-2021 (Persen)**



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS dapat memperlihatkan proporsi jumlah penduduk pada kelompok umur di jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut. Gambar 3.4 memperlihatkan bahwa APS Kota Pekalongan memiliki kecenderungan terus meningkat setiap tahunnya di setiap kelompok umurnya.

### 3.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi

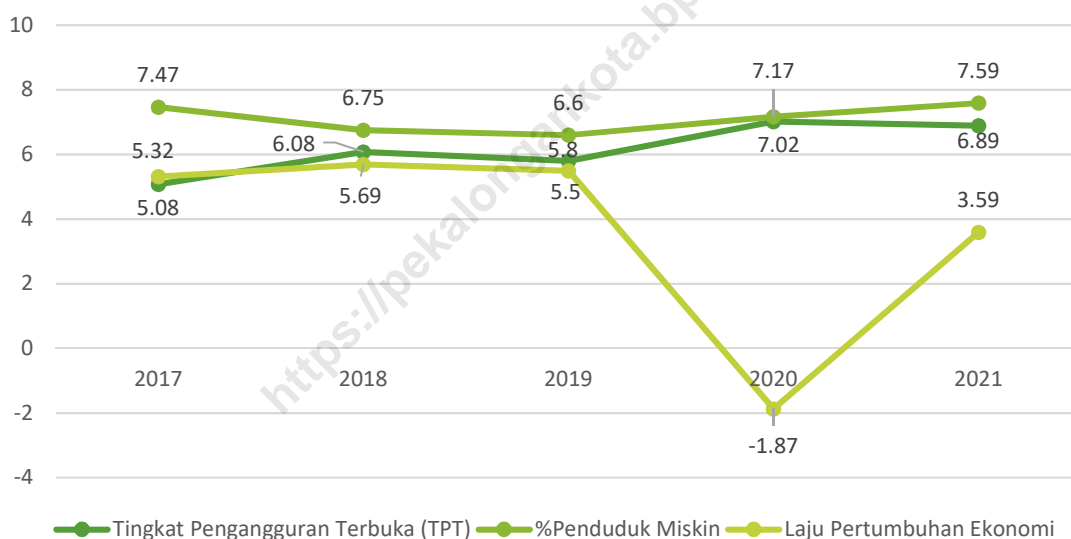
Kapabilitas manusia dalam bidang ekonomi seringkali terkendala dalam aspek kemiskinan. Faktor kemiskinan dapat mengurangi tingkat aksesibilitas ke aspek kehidupan yang lain, seperti: fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pada sub bagian sebelumnya sudah dibahas bahwa dua aspek tersebut juga merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi mengingat kuatnya hubungan saling mempengaruhi dengan dimensi kehidupan yang lain.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah maupun pemerintah kota. Hal itu dikarenakan meningkat atau tidaknya laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut terutama dalam aspek perekonomian. Dengan adanya keberhasilan pembangunan di bidang

perekonomian di suatu wilayah maka dapat mengatasi permasalahan pembangunan yang selalu menjadi momok suatu wilayah yakni kemiskinan dan pengangguran.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat seringkali terhambat oleh permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Tingginya angka pengangguran menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan yang akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Berkurangnya pendapatan masyarakat juga akan mempengaruhi daya belinya. Masyarakat hanya akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dengan terpaksa mengesampingkan kebutuhan terhadap kesehatan dan pendidikan yang layak dan berkualitas. Suka atau tidak suka kondisi tersebut juga akan mempengaruhi kualitas manusia generasi selanjutnya jika tidak serius ditangani.

**Gambar 3.6. Tingkat Pengangguran, Persentase Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan, 2017-2021 (Persen)**



Sumber: BPS

Selama periode 2017 s.d 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Dari awalnya hanya tercatat sebesar 5,08 persen di tahun 2017 menjadi 5,5 persen di tahun 2019. Meskipun pada tahun 2020, pertumbuhan Kota Pekalongan mengalami kontraksi sebesar -1,87 persen sebagai dampak adanya pandemi Covid 19 yang menyerang di awal tahun 2020 tetapi pada tahun 2021 sudah membaik kembali terlihat dari pertumbuhannya yang kembali positif sebesar 3,59 persen. Tren perkembangan presentase penduduk miskin di Kota Pekalongan selama periode 2017 s.d 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 tercatat bahwa tingkat presentase penduduk miskin di Kota Pekalongan mencapai angka 7,47 persen. Angka tersebut cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sampai tahun 2019. Namun

pada tahun 2020 angka tersebut meningkat menjadi 7,17 persen sebagai imbas adanya pandemi Covid-19 yang kemudian naik kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 7,59 persen. Tren perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Pekalongan selama tahun 2017 s.d 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 tren TPT menunjukkan penurunan pengangguran, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebagai dampak Covid-19 yang memaksa perusahaan harus merumahkan atau menutup usahanya dengan adanya kebijakan penutupan pusat perbelanjaan sebagai antisipasi meluasnya penyebaran virus Covid-19. Pada tahun 2021 dampak dari Covid-19 masih terasa di Kota Pekalongan namun sudah perlahan pulih kembali, namun jika dilihat dari TPT nya nilainya masih cukup tinggi yaitu sebesar 6,89 persen.

Pada Bab 2 sudah dijelaskan bahwa pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan terus meningkat setiap tahunnya selama periode 2012 s.d 2019 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan mengalami kontraksi Dengan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2020 sebagai imbas dari pandemi Covid-19, maka pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan juga ikut menurun. Pada tahun 2021 pengeluaran riil per kapita mengalami peningkatan kembali yang menunjukkan perekonomian juga perlahan kembali pulih.

Mengingat komponen pembentuk IPM juga berkaitan dengan aspek kehidupan yang lain maka pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan di komponen pembentuk IPM saja. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan dan program kerja yang bisa bersinergi ke semua aspek kehidupan sehingga tujuan pembentukan manusia berkualitas Kota Pekalongan dapat terwujud.







# PERKEMBANGAN IPM KAB/KOTA DI WILAYAH EKS KARESIDENAN PEKALONGAN



Umur Harapan Hidup  
Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2021

**TERTINGGI**  
Kabupaten Batang  
sebesar 74,74 tahun



**TERENDAH**  
Kabupaten Brebes  
sebesar 69,54 tahun

Harapan Lama Sekolah  
Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2021

**TERTINGGI** Kabupaten Pemalang  
sebesar 11,96 tahun  
**TERENDAH** Kota Tegal  
sebesar 13,07 tahun



Rata-rata Lama Sekolah  
Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2021

**TERTINGGI**  
Kota Pekalongan  
sebesar 9,18 tahun



**TERENDAH**  
Kabupaten Brebes  
sebesar 6,22 tahun

Pengeluaran Per Kapita  
Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2021

**TERTINGGI**  
Kota Tegal  
sebesar Rp. 13,14 juta

**TERENDAH**  
Kabupaten Pemalang  
sebesar Rp 8,57 juta



## BAB 4

# PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH EKS KARESIDENAN PEKALONGAN

Pemerintah sangat mengharapkan agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan sesuai dengan amanah konstitusi yang tercantum dalam Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dengan meratanya pembangunan dalam berbagai bidang diharapkan dapat mendorong adanya capaian pembangunan manusia yang merata di seluruh pelosok wilayah baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Jika semua hal tersebut dapat berjalan sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah maka hal tersebut juga dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan urbanisasi yang seringkali melanda wilayah perkotaan.

**Tabel 4.1. Nilai IPM dan Status Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**

Kabupaten/Kota	IPM	
	Nilai	Status
Batang	68,92	Sedang
Pekalongan	70,11	Sedang
Pemalang	66,56	Sedang
Tegal	68,79	Sedang
Brebes	66,32	Sedang
Kota Pekalongan	75,40	Tinggi
Kota Tegal	75,52	Tinggi

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

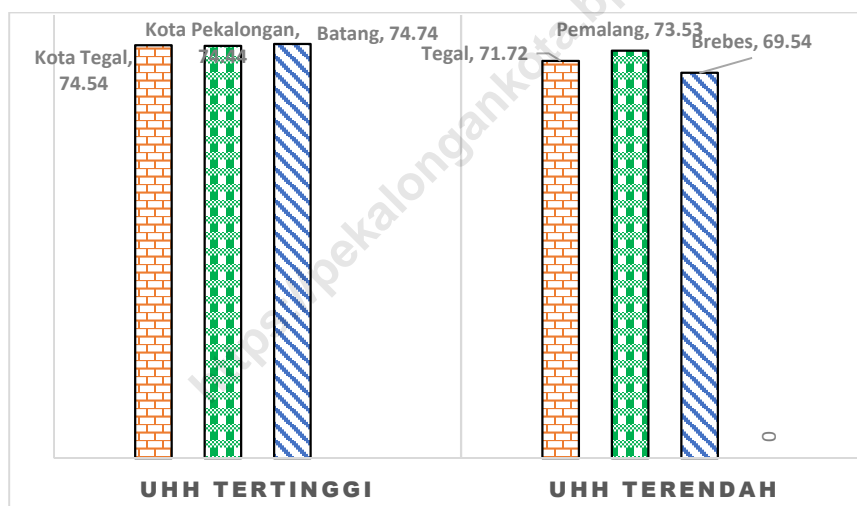
Pada Bab 2 dijelaskan bahwa capaian pembangunan manusia di wilayah eks Karesidenan Pekalongan cukup beragam. Hanya dua wilayah kota yang telah berhasil mencapai level pembangunan manusia berstatus “tinggi” yakni Kota Tegal (75,52) dan Kota Pekalongan (75,40). Sebaliknya, capaian pembangunan manusia di lima kabupaten yang

ada di wilayah eks Karesidenan Pekalongan baru berhasil mencapai status “Sedang” dengan capaian pembangunan manusia terendah masih dipegang oleh Kabupaten Brebes dengan angka IPM sebesar 66,32.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk seluruh kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan pada tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2021 pandemi Covid-19 sudah mulai membaik terutama kondisi perekonomian dan sosial. Hal ini terlihat dari komponen IPM yang mengalami kenaikan terutama pengeluaran perkapita.

#### 4.1. Perkembangan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan

**Gambar 4.1. Tiga Wilayah dengan UHH Tertinggi dan Terendah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**

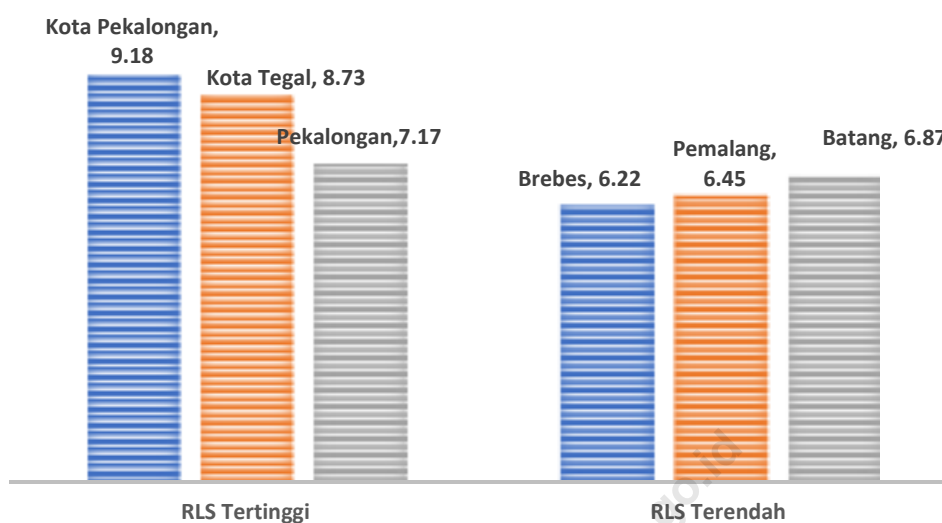


Sumber: BPS

Untuk memahami tingkat kualitas pembangunan manusia di kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan maka perlu dicermati juga untuk mencermati perkembangan masing-masing komponennya. Di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, UHH yang menjadi pengukur keberhasilan pembangunan di dimensi kesehatan pada tahun 2021 berkisar antara 69,54 tahun sampai 74,74 tahun. UHH tertinggi diraih oleh Kabupaten Batang, sedangkan UHH terendah dipegang oleh Kabupaten Brebes.

HLS dan RLS yang menggambarkan kualitas pembangunan di bidang pendidikan. Nilai RLS wilayah Eks Karesidenan Pekalongan bernilai antara 6,22 tahun sampai 9,18 tahun pada tahun 2021. RLS tertinggi diraih oleh Kota Pekalongan, sedangkan RLS terendah dipegang oleh Kabupaten Brebes.

**Gambar 4.2. Tiga Wilayah dengan RLS Tertinggi dan Terendah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**

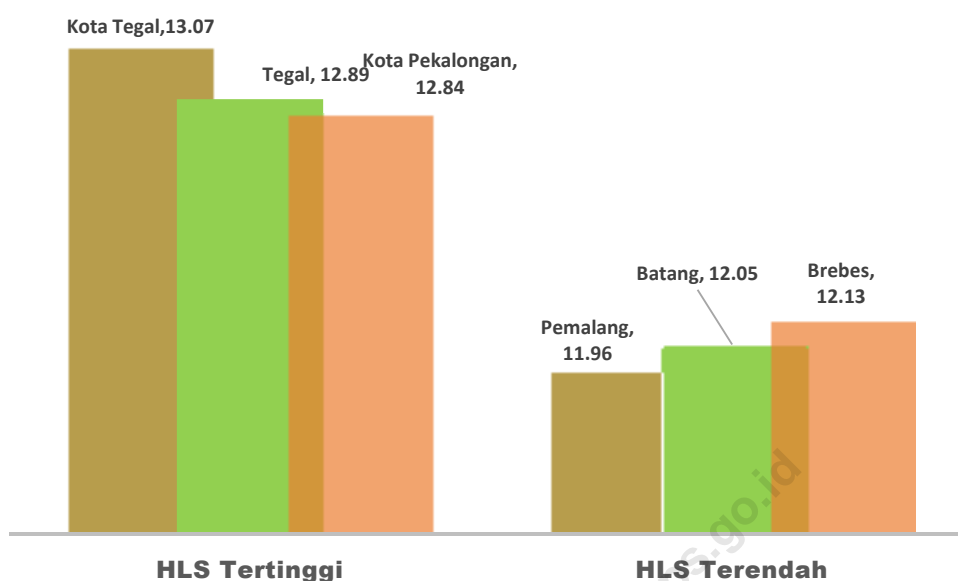


Sumber: BPS

Pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kabupaten yang masuk urutan RLS terendah yakni Kabupaten Brebes dan Pemalang, pada tahun 2021 secara rata-rata penduduknya yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,22 dan 6,45 tahun atau dapat dikatakan telah menamatkan SD atau kelas VI. Sedikit berbeda untuk Kabupaten Batang, rata-rata penduduknya yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,87 tahun atau dapat dikatakan hampir menamatkan kelas VII (Kelas 1 SMP). Meskipun Kabupaten Tegal masuk ke dalam kategori wilayah dengan RLS tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, namun kondisinya sama dengan Kabupaten Batang. Untuk wilayah yang masuk kategori RLS tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan yakni Kota Pekalongan, rata-rata penduduknya yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,18 untuk Kota Pekalongan yang berarti sudah sampai tingkat IX. S tahun atau dapat dikatakan hampir menamatkan kelas VIII.

Nilai HLS wilayah Eks Karesidenan Pekalongan bernilai antara 11.96 tahun sampai 13,07 tahun pada tahun 2021. HLS tertinggi diraih oleh Kota Tegal, sedangkan HLS terendah dipegang oleh Kabupaten Pemalang.

**Gambar 4.3. Tiga Wilayah dengan HLS Tertinggi dan Terendah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**

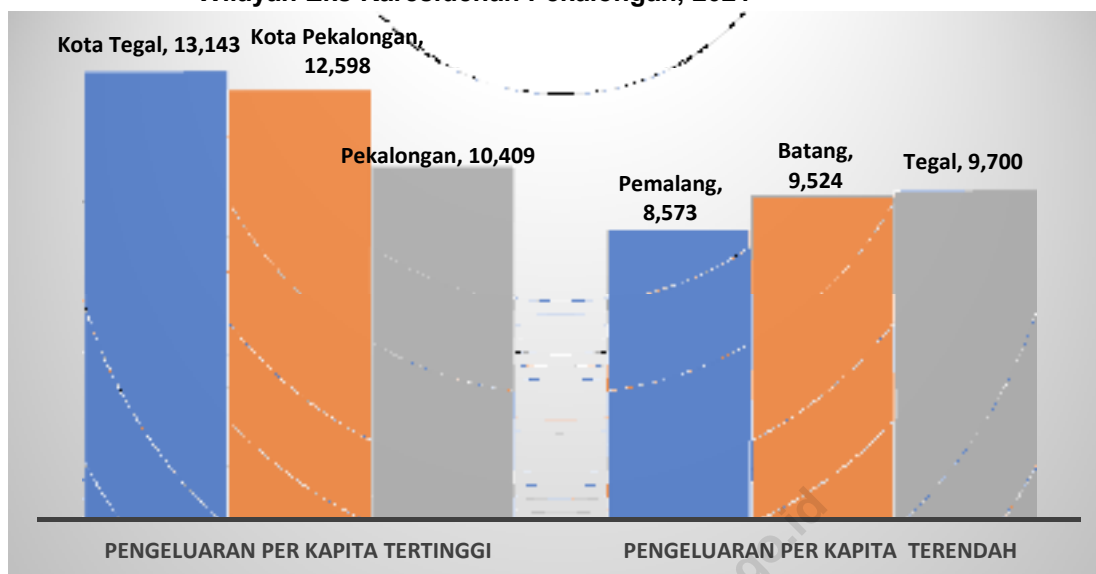


Sumber: BPS

Pada Gambar 4.2 juga menunjukkan bahwa kabupaten yang masuk urutan HLS terendah yakni Kabupaten Pemalang, Batang dan Brebes, pada tahun 2021 penduduknya yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan formal selama 11,96 tahun, 12,05 tahun dan 12,13 tahun atau setara kelas III SMA. Sementara kabupaten/kota yang masuk urutan HLS tertinggi yakni Kota Tegal, Kota Pekalongan dan Kabupaten Tegal, pada tahun 2021 penduduknya yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan formal selama 13,07 tahun, 12,89 tahun dan 12,84 tahun atau setara dengan Diploma 1.

Dari ketiga komponen pembentuk IPM, dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita memiliki kecenderungan mengalami ketimpangan antara Kabupaten/kota yang masuk urutan pengeluaran per kapita tertinggi dengan kabupaten yang masuk urutan pengeluaran per kapita terendah.

**Gambar 4.4. Tiga Wilayah dengan Pengeluaran Per Kapita Tertinggi dan Terendah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**




Sumber: BPS

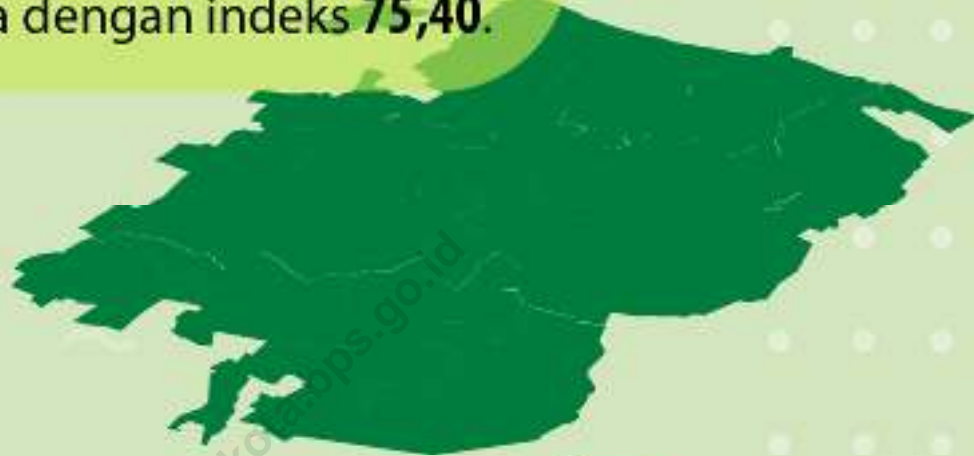
Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Tegal mencapai Rp13.143.000,- yang masuk ke dalam urutan tertinggi pengeluaran per kapitanya di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Sedangkan Kota Pekalongan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp12.598.000,-. Selisih antara Kota Tegal dengan Kota Pekalongan tidak terlalu jauh. Kondisi ini sangat dipahami mengingat Kota Tegal dan Kota Pekalongan memiliki karakteristik wilayah yang hampir sama yakni perkotaan. Kondisi yang berbeda terjadi pada Kabupaten Pekalongan. Meskipun masuk dalam kategori daerah dengan pengeluaran per kapita tertinggi, namun besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan hanya mencapai Rp10.409.000,-. Selisihnya cukup besar. Hal ini dikarenakan karakteristik wilayahnya yang berbeda. Selisih terbesar terjadi antara Kota Tegal yang pengeluaran per kapitanya tertinggi di wilayah eks Karesidenan Pekalongan dengan Kabupaten Pemalang yang pengeluaran per kapitanya terendah yaitu sebesar Rp8.573.000,-. Meskipun lokasi Kota Tegal bertetangga dengan Kabupaten Pemalang, namun karena karekteristiknya berbeda maka sangat wajar jika selisih pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga besar



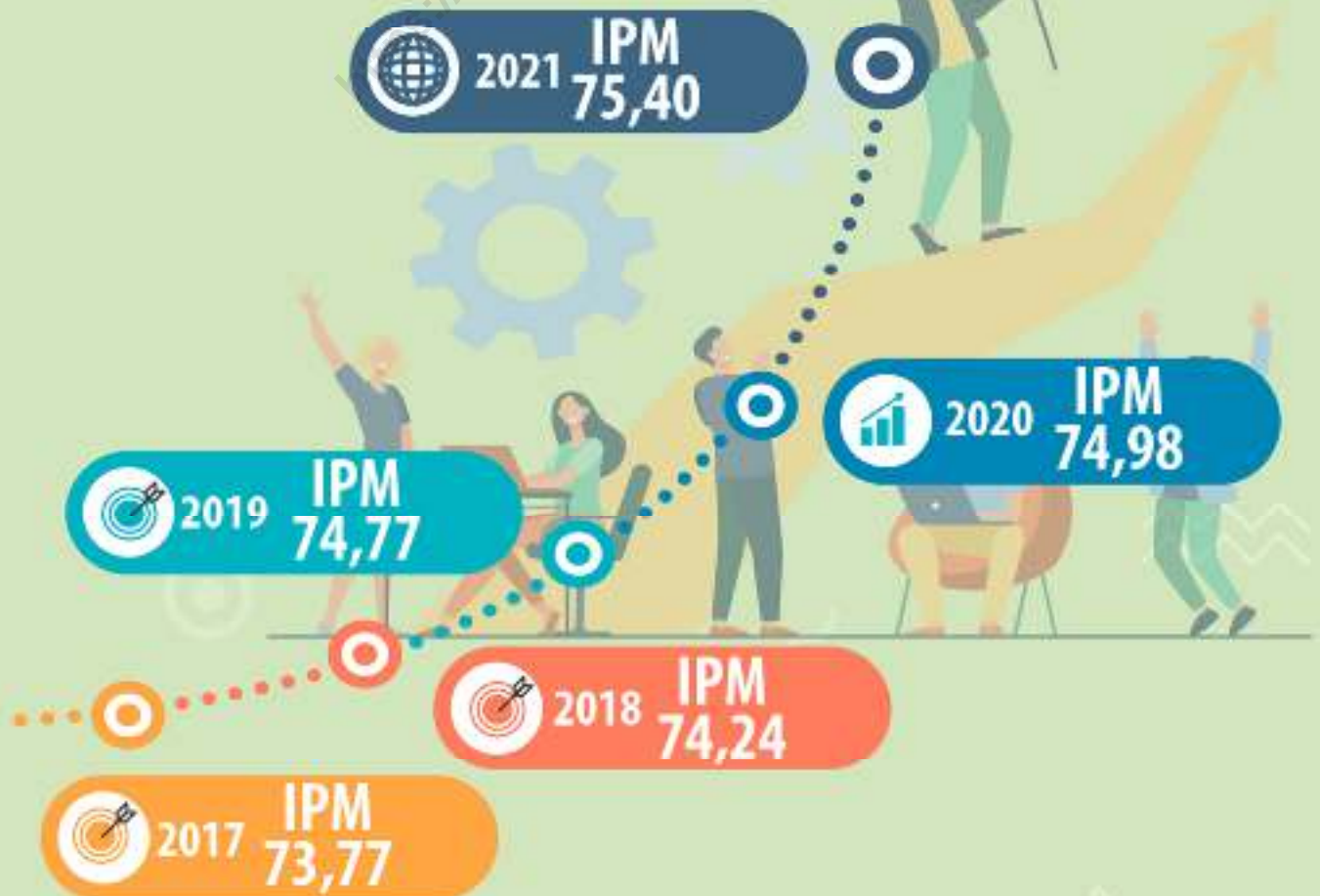
# KESIMPULAN



Pada tahun 2021, IPM Kota Pekalongan menempati peringkat ke-9 dari 35 kabupaten/kota dengan indeks **75,40**.



## PERKEMBANGAN IPM DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017-2021



# BAB 5

## KESIMPULAN

Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan tahun 2021 telah mencapai 75,40. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 72,16. Dengan capaian tersebut, Kota Pekalongan masuk kategori wilayah yang status pencapaian pembangunan manusia “tinggi”. Capaian tersebut juga berhasil membawa Kota Pekalongan berada pada urutan ke 9 dari 35 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jika dibandingkan di wilayah eks karesidenan Pekalongan, IPM Kota Pekalongan di wilayah eks karesidenan Pekalongan berada di bawah Kota Tegal dan diatas kabupaten/kota lain di eks karesidenan Pekalongan.

Capaian IPM Kota Pekalongan pada tahun 2021 adalah agregasi dari capaian tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) menunjukkan capaian yang bagus. Bayi yang lahir pada tahun 2021 berpeluang bisa bertahan hidup sampai berumur 74,44 tahun. Dimensi Pengetahuan diukur dengan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebesar 9,18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Kota Pekalongan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,18 tahun atau dengan kata lain sudah menamatkan jenjang SMP dan berada di kelas X. Pencapaian ini tentunya masih di bawah harapan pemerintah yang memiliki program wajib belajar 9 tahun. Namun, jika dilihat dari angka HLS Kota Pekalongan pada tahun 2021 telah mencapai 12,85 tahun. Angka ini menjelaskan bahwa secara rata-rata anak yang berusia 7 tahun di Kota Pekalongan yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2021 memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formalnya selama 12,85 tahun atau setara Diploma I. Kondisi ini tentu menambah rasa optimis Pemerintah Kota Pekalongan dapat mencapai target program wajib belajar 12 tahun. Dimensi standar hidup layak diukur dengan menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita per



tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2021 pengeluaran riil per kapita per tahun Kota Pekalongan yang disesuaikan adalah sebesar Rp12.598.000, naik sebesar 1,05 persen atau sebanyak Rp131.000,- dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian pembangunan manusia di wilayah eks Karesidenan Pekalongan cukup beragam. Hanya dua wilayah kota yang telah berhasil mencapai level pembangunan manusia berstatus “tinggi” yakni Kota Tegal (75,52) dan Kota Pekalongan (75,40). Sebaliknya, capaian pembangunan manusia di lima kabupaten yang ada di wilayah eks Karesidenan Pekalongan baru berhasil mencapai status “Sedang” dengan capaian pembangunan manusia terendah masih dipegang oleh Kabupaten Brebes dengan angka IPM sebesar 66,32.



<https://pekalongankota.bps.go.id>

**Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota  
di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2021**

Kab/Kota	UHH (Tahun)	EYS (Tahun)	MYS (Tahun)	Pengeluaran (000Rp)	IPM	Rangking	Pertumbuhan (%)
Jawa Tengah	74.47	12.77	12.77	7.75	<b>72.16</b>	<b>13</b>	<b>0.40</b>
Batang	74.74	12.13	6.88	9,524	68.92	30	0.39
Pekalongan	73.74	12.42	7.17	10,409	70.11	25	0.68
Pemalang	73.53	11.96	6.45	8,573	66.56	34	0.36
Tegal	71.72	12.89	6.99	9,700	68.79	31	0.58
Brebes	69.54	12.05	6.22	10,152	66.32	35	0.32
Kota Pekalongan	74.44	12.85	9.18	12,598	75.40	9	0.56
Kota Tegal	74.54	13.07	8.73	13,143	75.52	8	0.60

**Lampiran 2. Tren Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021**

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	70.52	71.12	71.73	71.87	72.16
Batang	<b>67.35</b>	<b>67.86</b>	<b>68.42</b>	<b>68.65</b>	68.92
Pekalongan	68.40	68.97	69.71	69.63	70.11
Pemalang	<b>65.04</b>	<b>65.67</b>	<b>66.32</b>	<b>66.32</b>	66.56
Tegal	66.44	67.33	68.24	68.39	68.79
Brebes	<b>64.86</b>	<b>65.68</b>	<b>66.12</b>	<b>66.11</b>	66.32
Kota Pekalongan	73.77	74.24	74.77	74.98	75.40
Kota Tegal	<b>73.95</b>	<b>74.44</b>	<b>74.93</b>	<b>75.07</b>	75.52

**Lampiran 3. Tren Komponen Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021**

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	<b>74.08</b>	<b>74.18</b>	<b>74.23</b>	<b>74.37</b>	<b>74.47</b>
Batang	74.50	74.56	74.59	74.69	74.74
Pekalongan	73.46	73.53	73.57	73.69	73.74
Pemalang	72.98	73.11	73.22	73.40	73.53
Tegal	71.14	71.28	71.40	71.60	71.72
Brebes	68.61	68.84	69.04	69.33	69.54
<b>Kota Pekalongan</b>	74.19	74.25	74.28	74.38	74.44
<b>Kota Tegal</b>	74.23	74.30	74.34	74.46	74.54

**Lampiran 4. Tren Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021**

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	<b>12.57</b>	<b>12.63</b>	<b>12.68</b>	<b>12.70</b>	<b>12.77</b>
Batang	11.87	11.88	12.00	12.01	12.13
Pekalongan	12.16	12.17	12.40	12.41	12.42
Pemalang	11.88	11.91	11.94	11.95	11.96
Tegal	12.06	12.34	12.58	12.67	12.89
Brebes	11.69	12.02	12.03	12.04	12.05
<b>Kota Pekalongan</b>	12.78	12.79	12.83	12.84	12.85
<b>Kota Tegal</b>	12.89	12.90	13.04	13.05	13.07

**Lampiran 5. Tren Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021**

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	<b>7.27</b>	<b>7.35</b>	<b>7.53</b>	<b>7.69</b>	<b>7.75</b>
Batang	6.61	6.62	6.63	6.87	6.88
Pekalongan	6.73	6.74	6.88	6.91	7.17
Pemalang	6.31	6.32	6.41	6.42	6.45
Tegal	6.55	6.70	6.86	6.98	6.99
Brebes	6.18	6.19	6.20	6.21	6.22
<b>Kota Pekalongan</b>	8.56	8.57	8.71	8.96	9.18
<b>Kota Tegal</b>	8.29	8.30	8.31	8.51	8.73

**Lampiran 6. Tren Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP) menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, 2017-2021 (Ribu Rupiah)**

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	<b>10,377</b>	<b>10,777</b>	<b>11,102</b>	<b>10,930</b>	11,034
Batang	8,805	9,203	9,573	9,431	9,524
Pekalongan	9,702	10,221	10,508	10,312	10,409
Pemalang	7,785	8,186	8,546	8,461	8,573
Tegal	9,136	9,433	9,798	9,612	9,700
Brebes	9,554	9,890	10,238	10,058	10,152
Kota Pekalongan	11,800	12,312	12,680	12,467	12,598
Kota Tegal	12,283	12,830	13,250	12,999	13,143

# Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Edisi Oktober 2022. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2021. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2021 Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PEKALONGAN**

Jalan Singosari, Pekalongan

Telp (0285) 423504 Faks (0285) 4420122

Homepage: [pekalongankota.bps.go.id](http://pekalongankota.bps.go.id) Email: [bps3375@bps.go.id](mailto:bps3375@bps.go.id)